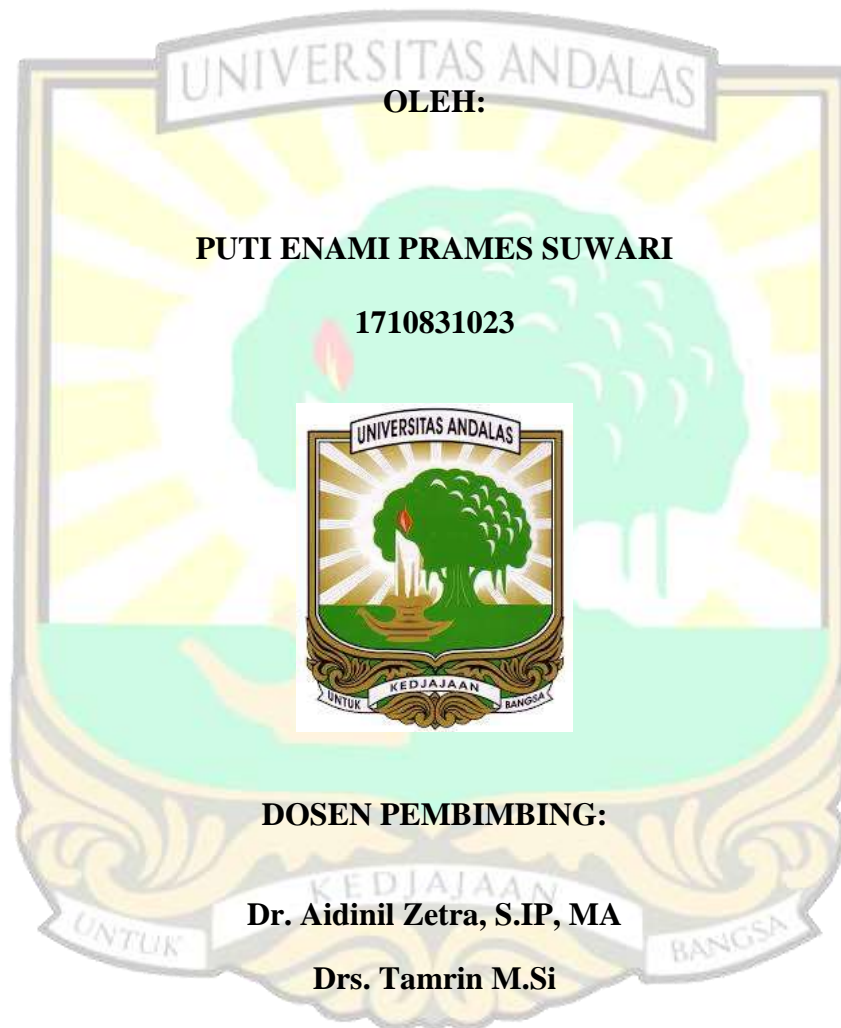


**PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN WAJIB SHALAT SUBUH
BERJAMAAH TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI
KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

ABSTRAK

Puti Enami Prames Suwari. 1710831023. Program Sarjana Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang. 2022. Terdiri dari 34 Referensi, diantaranya: 17 Buku, 7 Jurnal dan 6 Sumber Elektronik.

Kebijakan publik tidak selamanya dalam bentuk peraturan, kebijakan publik juga dapat berupa himbauan atau sikap diam yang dilakukan oleh pemerintah dalam menganggapi suatu persoalan tertentu. Melihat kepada aturan kebijakan yang di buat oleh Walikota Bukittinggi terkait wajib shalat subuh berjemaah bagi ASN Kota Bukittinggi, sesuai dengan di edarkannya surat undangan mengenai pelaksanaan shalat subuh berjemaah yang di keluarkan oleh sekretaris daerah Kota Bukittinggi. Hal ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan di kalangan ASN sendiri, karena perumusan kebijakan yang dianggap kurang jelas sehingga menjadi kontraproduktif. Tidak adanya kejelasan mengenai keberlangsungan kebijakan tersebut baik secara substansi maupun teknis, sehingga peneliti berasumsi bahwa bahwa lahirnya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam melahirkan suatu kebijakan. Asumsi tersebut berdasarkan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan masih bersifat ambigu atau tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan proses perumusan kebijakan wajib shalat subuh berjemaah terhadap aparatur sipil negara di Kota Bukittinggi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan studi kasus, dan menggunakan konsep kebijakan publik oleh Ripley yaitu *Agenda Setting*, *Formulation* dan *Legitimation*, serta *Program Implementaion*. Berdasarkan konsep tersebut dapat di ketahui bahwa proses perumusan kebijakan wajib shalat subuh berjemaah bagi ASN di Kota Bukittinggi tidak dilakukan sesuai dengan konsep yang ada, dimana aturan kebijakan tersebut merupakan sebuah himbauan atau aturan tidak tertulis sehingga tidak memerlukan perumusan kebijakan secara formal. Hal ini sesuai dengan asumsi awal peneliti, sehingga karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam proses perumusannya, aturan ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Walikota Bukittinggi dalam proses perumusan kebijakannya tetap berkoordinasi dengan beberapa Stakholder yang ada di Bukittinggi guna meminta saran terkait aturan tersebut. Kebijakan ini tetaplah menjadi sebuah kebijakan publik, sesuai dengan yang disampaikan oleh Thomas R Dye dalam buku *Understanding Public Policy* bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan Bukittinggi

ABSTRACT

Puti Enami Prames Suwari. 1710831023. Bachelor Program Majoring in Political Science. Faculty of Social Science and Political Science Andalas University 2022. Consists of 34 referance: with 17 books, 7 Journals, 1 and 10 electronic source

Public policy is not always in the form of regulations, public policy can also be in the form of an appeal or silence by the government in responding to a particular issue. Looking at the policy rules made by the Mayor of Bukittinggi, R regarding the Compulsory Morning Prayer in congregation for ASN of Bukittinggi City, in accordance with the circulation of an invitation letter regarding the implementation of the mandatory morning prayer in congregation issued by the regional secretary of the city of Bukittinggi. This has sparked controversy among the public and among ASN themselves, because the formulation of policies that are considered less clear can be counterproductive. There is no clarity regarding the sustainability of the policy, both in substance and technically, so the researcher assumes that the birth of the policy does not go according to the stages in producing a policy. This assumption is based on the researcher's findings which show that the policies that have been implemented are still ambiguous or unclear. This study aims to identify and explain the Policy Formulation Process of "Mandatory Subuh Prayers in Congregation" Against State Civil Apparatuses in Bukittinggi City, using qualitative research methods with a case study type approach, and using the concept of Public Policy by Ripley namely Agenda Setting, Formulation and Legitimation, and Program Implementation. Based on this concept, it can be seen that the process of formulating the Mandatory Subuh Congregational Prayer policy for ASN in Bukittinggi City is not carried out according to the existing concept, where the policy rule is an appeal or unwritten rule so it does not require formal policy formulation. This is in accordance with the initial assumptions of the researcher, so that due to the uncertainty in the formulation process, this rule has become controversial among the public. However, in the process of formulating the policy, the Mayor of Bukittinggi is coordinating with several stakeholders in Bukittinggi to seek advice regarding the regulation. This policy remains a public policy, as stated by Thomas R Dye in the book *Understanding Public Policy* that public policy is whatever the Government chooses to do or not to do.

Keyword: Public Policy, Aparatur Sipil Negara, Bukittinggi Government